



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMOENG PRIYO SIGIT PAMOENGKAS
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
3. NHK : 966492

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 280.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 99.800 m2 di KAB / KOTA BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 108.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MANUAL Tahun 2007, HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA E Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 395.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 64.724.341

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 847.724.341

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 847.724.341

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.